

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PELAKSANAAN ASESMEN TERPADU SEBAGAI UPAYA REHABILITASI PENGGUNA NARKOTIKA**

**Oleh**

**KALVARI YAN SITUMORANG**

Narkotika merupakan sebuah ancaman besar bagi keberlangsungan hidup sebuah bangsa. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pengaturan tersebut membuka peluang bagi orang yang sedang dalam proses hukum terkait kasus narkotika untuk mengajukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dapat atau tidaknya menjalani proses rehabilitasi pada tahap penyidikan dan penuntutan akan tergantung kepada proses asesmen yang dilakukan. Proses asesmen ini berperan penting dalam menentukan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Namun dalam pelaksanaan asesmen terpadu di lapangan tentu saja tidak seluruhnya berjalan dengan baik dan lancar, terdapat beberapa hambatan yang membuat belum optimalnya pelaksanaan asesmen terpadu ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan asesmen terpadu sebagai upaya rehabilitasi pengguna narkotika dan faktor yang menghambat pelaksanaan asesmen terpadu sebagai upaya rehabilitasi pengguna dan narkotika.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, Psikolog Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Dosen pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terhadap pengguna narkotika yang menjalani proses hukum pada tahap penyidikan atau penuntutan dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial setelah melalui proses asesmen terpadu. Asesmen terpadu merupakan strategi untuk mengaktifkan penegakan tindak pidana narkotika dengan menekan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Proses asesmen dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari Tim Hukum dan Tim Dokter.

***Kalvari Yan Situmorang***

Melalui Tim Asesmen Terpadu akan ditentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa penyalahguna narkotika sebagai pengguna atau justru sebagai pengedar, serta melalui Tim Medis akan diuji kandungan serta tingkat keparahan pengguna narkotika. Apabila berdasarkan pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu diputuskan dapat menjalani rehabilitasi medis, maka tersangka atau terdakwa pengguna narkotika akan diserahkan ke lembaga rehabilitasi. Pelaksanaan asesmen terpadu tidak selalu berjalan dengan baik, ditemukan beberapa hambatan yang berasal dari faktor hukum, penegak hukum, sarana dan masyarakat.

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah perlunya memasukkan ketentuan mengenai asesmen terpadu kedalam substansi Undang-Undang Narkotika yang akan datang, perlunya peningkatan kerjasama antara aparat penegak hukum dan instansi pemerintah agar terbentuk sinergitas yang baik dalam pelaksanaan asesmen terpadu, perlu melibatkan Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan sarana dan fasilitas rehabilitasi serta perlunya mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat.

**Kata kunci: Asesmen Terpadu, Rehabilitasi, Narkotika.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED ASSESSMENTS AS A DRUG USER REHABILITATION EFFORT**

**By**

**KALVARI YAN SITUMORANG**

Narcotics pose a serious threat to a country's survival. Drugs addicts and victims of narcotics abusers are obligated to undertake medical and social rehabilitation, according to Article 54 of Law Number 35 of 2009. This arrangement allows those who are involved in narcotics-related legal processes to apply for medical and social rehabilitation. The assessment procedure will determine whether or not to proceed with the rehabilitation process during the investigation and prosecution stages. This evaluation method is crucial in deciding whether or not a narcotics abuser can be rehabilitated. However, not everything went well and smoothly during the field implementation of the integrated assessment; there were various challenges that made the implementation of this integrated assessment less than ideal. The subject addressed in this study is the implementation of an integrated evaluation in an endeavor to rehabilitate narcotics addicts, as well as the variables that impede such implementation.

The research technique is a mix of normative and empirical legal study. Investigators from the National Narcotics Agency of Lampung Province, Psychologists from the National Narcotics Agency of Lampung Province, and Lecturers from the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung served as informants in this study. A literature review and a field study were used to gather information. The information gathered was subsequently examined using qualitative descriptive methods.

The findings and discussion show that drugs users who are subjected to legal proceedings during the investigation or prosecution stage can receive medical and social rehabilitation after undergoing an integrated assessment process. Integrated assessment is an approach for streamlining narcotics enforcement by lowering demand through narcotics user rehabilitation. The Integrated Assessment Team (TAT), which consists of the Legal Team and the Doctor Team, oversees the assessment process. It will be decided whether a suspect or defendant is a narcotics abuser as a user or a dealer by the Integrated Assessment Team, and the content and severity of narcotics users will be tested by the Medical Team. If the Integrated Assessment Team determines that the suspect or accused of taking

drugs can benefit from medical rehabilitation, they will be transferred to a rehabilitation facility. Integrated assessment implementation does not always go well; numerous roadblocks are encountered, including legal issues, law enforcement, facilities, and the community.

The proposal that the author can convey is the need to include provisions for integrated assessment in the content of the following Narcotics Act, cooperation between law enforcement officers and government agencies to form a positive synergistic effect in the implementation of integrated assessment. It is necessary to strengthen. Local governments need to be involved and strengthened for the community in providing rehabilitation facilities and facilities.

**Keywords: Integrated Assessment, Rehabilitation, Narcotics.**